

## **BAB I PENDAHULLUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penilaian prestasi ekonomi suatu Negara harus dilakukan, karena dengan pengukuran prestasi ekonomi dapat diukur keberhasilan pemerintahan yang dijalankan, serta untuk mengetahui tingkat keberhasilan kebijakan makroekonomi yang dijalankan. Untuk mengukur prestasi makroekonomi dapat dilihat dari indikator ekonomi seperti, kemiskinan dan pengangguran. Di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masalah kemiskinan dan pengangguran masih membutuhkan perhatian ekstra dari pemerintah. Meski pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan, namun kenyataannya jumlah pengangguran dan warga miskin masih tergolong tinggi. Jumlah itu berbanding dengan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan hingga persentase penduduk miskin di perkotaan tidak banyak berubah.

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Jika jumlah pengangguran tinggi, berarti banyak masyarakat yang tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya sehingga mengakibatkan harus mengurangi kebutuhan dan menjadi miskin.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan merupakan isu global yang dihadapi banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), penurunan kemiskinan menjadi isu yang mendapatkan perhatian serius. Hal ini terbukti dengan masuknya penurunan kemiskinan dan kelaparan sebagai tujuan pertama dan kedua, serta dibangunnya komitmen global untuk mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun Bappenas (2018:1). Kemiskinan yang semakin luas serta angka yang tinggi merupakan inti dari semua masalah pembangunan. Todaro dan Smith (2011: 251). Kemiskinan tidak terlepas dari adanya undang-undang No. 13 Tahun 2011 bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab negara untuk menanggulangi kemiskinan diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Isu kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang tragis yang menyangkut dengan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan seringkali dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah atau bangsa. Kemiskinan bersifat multidimensi yang perlu mendapatkan intervensi pada tataran nasional maupun daerah. Oleh karenanya, upaya kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurut UNDP (2009) Kemiskinan merupakan suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan. Pada tataran nasional, kemiskinan juga mendapat perhatian khusus oleh Pemerintah.

Kemiskinan biasanya digambarkan sebagai rendahnya pendapatan yang dimiliki seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ketidakmampuan

seseorang dalam memenuhi kebutuhannya karena tidak memiliki pendapatan yang cukup akan mengakibatkan dia berada digaris kemiskinan. Sesuai UU No.22 Tahun 1999 disebutkan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah tidak hanya melaksanakan program pembangunan tetapi juga bertanggung jawab secara langsung dan aktif dalam penanganan kemiskinan.

Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu contoh daerah yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan. Data BPS tahun 2015 menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi NTT menempati posisi ketiga persentase penduduk miskin tertinggi. Penelitian ini membahas pemodelan faktor-faktor yang mempengaruhi persentase kemiskinan di Kota Kupang, Provinsi NTT serta mengidentifikasi efek spasial yang terjadi di Kota Kupang. Masih tingginya angka kemiskinan di Kota Kupang membuat provinsi ini terus dilanda permasalahan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan masih merupakan agenda serius yang dihadapi dan perlu ditanggulangi salah satunya oleh Pemerintah Kota Kupang Pemerintah dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Jumlah dan persentase kemiskinan di Kota Kupang berdasarkan data dari periode 2011-2020 berfluktuasi dari tahun-ketahun.

Kondisi sebagian besar alam di Kota Kupang tandus dan gersang. Kekeringan dan rawan pangan seolah menjadi bencana rutin yang dihadapi warga Kota Kupang hampir setiap tahun mengalami Kemiskinan, kasus gizi buruk, angka putus sekolah, serta akses fasilitas kesehatan yang kurang memadai pada akhirnya menjadi mata rantai lanjutan dari persoalan itu. Sumber Daya Alam (SDA) yang

cukup besar dan beragam yang tersebar di setiap daerah, namun sampai saat ini potensi setiap sektor tersebut belum secara optimal dapat memberikan nilai tambah yang signifikan untuk mensejahterakan rakyat Kota Kupang. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya investasi yang dilakukan.

Pengukuran persentase kemiskinan di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pendekatan yang digunakan oleh BPS dalam mengukur jumlah penduduk miskin adalah menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS, 2015). Faktor penyebab kemiskinan dapat berupa karakteristik makro, sektoral, komunitas, rumahtangga, dan individu (World Bank dalam Usman, Sinaga & Siregar, 2006). Pada karakteristik makro, penyebab kemiskinan dapat berupa potensi ekonomi daerah, tingkat inflasi dan lain-lain. Pada karakteristik sektoral, penyebab kemiskinan dapat berupa tingkat pengangguran, pendidikan atau kontribusi sektor primer terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada karakteristik komunitas, penyebab kemiskinan dapat berupa infrastruktur seperti penyediaan air bersih, listrik, dan jalan. Sedangkan pada karakteristik rumah tangga dan individu, penyebab kemiskinan dapat berupa jumlah anggota keluarga, jumlah tahun bersekolah dari seluruh anggota keluarga, dan mata pencaharian kepala keluarga.

**Tabel 1.1**

**Tingkat Pengangguran Terbuka  
Kota Kupang Tahun 2011-2020 (persen)**

<b>Tahun</b>	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>
2011	6.39
2012	8.38
2013	8.88
2014	11.38
2015	14.25
2016	-
2017	12.50
2018	10.78
2019	9.78
2020	10.9

*Sumber Data : BPS Provinsi NTT 2021*

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menurut Data BPS, Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan bahwa pada tahun 2016 BPS sedang menyelenggarakan sensus ekonomi, oleh sebab itu, dana untuk pengumpulan data pengangguran melalui Survei Angkatan Kerja Nasional ( SAKERNAS) dikurangi dan dialihkan ke Sensus Ekonomi. Oleh sebab itu, dana untuk pengumpulan data pengangguran tersedia hanya sampai pada tingkat provinsi..tingkat pengangguran di Kota Kupang yang terjadi pada tahun 2011-2020 mengalami kenaikan dan Penurunan setiap tahun. Di mana pada tahun 2011 persentase tingkat pengangguran terbuka berjumlah 6.395, dan mengalami peningkatan di tahun 2012 menjadi 8.385, pada tahun 2013 bertambah lagi menjadi 8.88%, dan terus meningkat di tahun 2014 menjadi 11.38%, pada tahun 2015 angka persentase pengangguran terbuka lebih meningkat jumlahnya menjadi 14.25%, di tahun 2017 tingkat pengangguran terbukamenalami penurunan menjadi 12.50%, pada tahun 2018 terus mengalami penurunan menjadi 10.17 %, pada tahun 2019

jumlah tingkat pengangguran terbuka menurun lagi menjadi 9.78%, dan tahun 2020 tingkat pengangguran meningkat menjadi 10.9%. Berdasarkan tabel di atas maka, dapat disimpulkan tingkat pengangguran di kota kupang mengalami peningkatan dan penurunan tiap tahunnya, pada tahun 2015 tingkat pengangguran di Kota Kupang mengalami peningkatan yang sangat tinggi yaitu 14.25%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis yaitu 10.9%.

**Tabel 1.2**

**Persentase Penduduk Miskin  
Di Kota Kupang Tahun 2011-2020 (Persen)**

Tahun	Persentase penduduk Miskin Kota Kupang
2011	9.88
2012	9.39
2013	9.33
2014	8.70
2015	10.21
2016	9.97
2017	9.81
2018	9.61
2019	9.22
2020	8.96

*Sumber data : BPS Provinsi NTT 2021*

Berdasarkan tabel 1.2 persentase penduduk miskin di Kota Kupang pada tahun 2011 tingkat persentase penduduk miskin berjumlah 9.88%, pada tahun 2012 jumlah persentase penduduk miskin berkurang menjadi 9,39%, di tahun 2013 persentase penduduk miskin masih mengalami penurunan menjadi 9.33%, persentase penduduk miskin masih mengalami penurunan di tahun 2014 jumlahnya berkurang lagi menjadi 8.70%, pada tahun 2016 jumlah angka persentase penduduk miskin meningkat menjadi 9.97%, di tahun 2017 meningkat

menjadi 9.81%, pada tahun 2018 presentase penduduk miskin menurun menjadi 9.61%, di tahun 2019 presentasi penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 9.22%, dan tahun 2020 presentase penduduk miskin semakin menurun menjadi 8.96%. Jadi tabel persentase penduduk miskin di atas menjelaskan bahwa tingkat penduduk miskin di kota kupang mengalami kenaikan dan penurunan tiap tahun atau tidak tentu.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik dan perlu melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Kupang Tahun 2011-2020**"

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran pengangguran terbuka dan kemiskinan di Kota Kupang ?
2. Bagaimana pengaruh pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di kota kupang ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui gambaran pengangguran terbuka dan kemiskinan di Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Kupang

## **1.4 Manfaat penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi pihak pemerintah Kota Kupang, hasil dari penelitian ini dapat di

Jadikan sebagai bahan masukan untuk pengentasan kemiskinan Di Kota Kupang 2011-2020.

2. Sebagai bahan studi dan tambahan ilmu pengetahuan Bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Katolik Widyadarmas Kupang.
3. Manfaat bagi peneliti untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Kota Kupang.